

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi instansi pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan pemerintah, bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Membangun komitmen aparatur daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai perwujudan dan fungsi Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat disamping sebagai Abdi Negara.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai bimbingan dan pelatihan teknis.
3. Penguatan posisi tawar pengguna pelayanan masyarakat melalui pemberitahuan hak dan kewajiban pemberi dan pengguna jasa.
4. Meningkatkan fungsi mekanisme penyampaian dan mengekspresikan ketidakpuasan atas penyelenggaraan pelayanan melalui penyusunan mekanisme dan pembentukan pelayanan penertiban dan pengamanan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas penertiban dan pengamanan dengan baik, untuk itu Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan visi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN YANG DEMOKRATIS AMAN DAN TERTIB
MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA YANG KONDUSIF, BERIMAN, CERDAS,
MAJU DAN BERADAT ”**

Dalam mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut disusunlah 6 (enam) misi yaitu:

1. Membangun identitas, Karakter dan Talenta Bangsa bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya empat konsensus dasar nasional.
2. Meningkatkan Toleransi beragama, menjaga kerukunan umat beragama dan merajut keberagaman dengan meningkatkan sikap saling menghargai antar agama dan kelompok masyarakat Padang Lawas Utara yang heterogen.
3. Mendorong Penguatan Koordinasi dan Komunikasi terhadap seluruh *stakeholder* dalam menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Padang Lawas Utara demi terwujudnya Kabupaten Padang Lawas Utara yang aman, tentram dan damai.
4. Memberdayakan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Memberdayakan organisasi masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Meningkatkan kualitas demokrasi dengan memantapkan kondisi demokrasi dan sosial politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Badan Kesatuan Bangsa, Politik kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selaras dengan fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai acuan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Memperlancar tugas-tugas administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Meningkatkan koordinasi teknis dengan Instansi Terkait di Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi maupun Pusat.

Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun ke depan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Daerah.

Sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya tugas-tugas administrasi perkantoran di Badan Kesatuan Bangsa, Politik;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor;
3. Terdapatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik.

C.PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk periode lima tahun kedepan maka program yang akan dilakukan adalah :

c.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Jasa Barang Cetak & Penggandaan
8. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
10. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
11. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

c.2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
3. Pengadaan Mebeleur

c.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Evaluasi Kedisiplinan Pegawai dan Honor

c.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja
3. Penyusunan Rencana Strategis
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember
6. Penyusunan laporan Inventarisasi barang/ aset

c.5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Penngendalian konflik Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

c.6 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

1. Pemberdayaan pemanataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
2. Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2006

c.7 Program Pembinaan Ormas

1. Sosialisasi UU tentang Ormas
2. Monitoring, Evaluasi Pelaporan
3. Peningkatan Kapasitas dan profesional Orkesmas
4. Forum Kemitraan Rapat Kerja antara orkesmas dan pemerinatahan
5. Bimtek tentang bantuan sosial untuk orkesmas

6. Tim Verifikasi Bantuan Sosial untuk Orkesma

c.8 Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
2. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri
3. Shering Informasi tentang Penanganan Gangguan Konflik Dalam Negeri
4. Pelayanan Terpadu bagi masyarakat guna penanganan konflik secara dini
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

c.9 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
2. Forum Kerukunan Umat Beragama
3. Forum Pembauran Kebangsaan
4. Sosialisasi Pengawasan orang asing
5. Sosialisai bela negara dan nkri
6. Peningkatan Karakter dan Penguatan wawasan Kebangsaan
7. Out bond Penanaman Jiwa Patriosme
8. Lomba Cerdas Cermat
9. Simulasi Pelatihan Kedisiplinan
10. Hari-Hari Besar/ Nasional
11. Penilaian Mental dan Ideologi Calon Kepala Desa
12. Peningkatan Pemahaman 4 pilar kebangsaan
13. Peningkatan Pemahaman tentang adat
14. Peningkatan Pemahaman tentang Bela Negara
15. Workshop Kesadaran dan Kepedulian dalam menyampaikan aspirasi

c.10 Program Pendidikan Politik

1. Forum Komunikasi Politik
2. Peningkatan Pemahaman Budaya dan etika politik
3. Forum Diskusi Politik

c.11 Program Peningkatan Fasilitas Partai politik dan Pemilu

1. Tim Pemantau Perkembangan Politik
2. Simulasi Penanganan Gangguan Pemilu
3. Tim Verifikasi Dana Pemilu
4. Pendidikan Pemilih Pemula

c.12 Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya

1. Pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok
2. Forum komunikasi peningkatan peran pemda dalam pembentukan lembaga ekonomi
3. Forum dialog konflik sumber daya ekonomi
4. Forum penguatan ketahanan ekonomi
5. Fasilitas pertemuan tokoh adat dan ormas
6. Pentas seni dan budaya
7. Seminar dan lokarya ketahanan ekonomi

c. 13. Program Rencana Aksi P4GN

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba
2. Pembentukan Kader Anti Narkoba

c. Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat

1. Monitoring dan evaluasi pembrantasan penyakit masyarakat
2. Sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas